



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS GADJAH MADA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : WIDYANDANA  
2. Jabatan : KETUA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU PENDIDIKAN  
KEDOKTERAN DAN KESEHATAN  
3. NHK : 1017088

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/90 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000  
2. Tanah dan Bangunan Seluas 248 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000  
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000  
4. Tanah dan Bangunan Seluas 329 m2/329 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000  
5. Tanah dan Bangunan Seluas 2.090 m2/2.090 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000  
6. Tanah dan Bangunan Seluas 2.182 m2/2.182 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000  
7. Tanah dan Bangunan Seluas 550 m2/500 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 250.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 25.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.775.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.775.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.